



**LAPORAN
KEUANGAN
BAGIAN
ANGGARAN 018
BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN KETINDAN
PER 31 DESEMBER 2021**

Jl. Ketindan No. 1 Lawang – Malang
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Jl. Ketindan No. 1 Lawang Malang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Malang, 31 Desember 2021
Kepala BBPP Ketindan,



Ir. Sumardi Noor, M.Si
NIP. 196401221994031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Lain-lain

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- E.1. Ekuitas Awal
- E.2. Surplus/Defisit-LO
- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
- E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
- E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malang, 31 Desember 2021

Kepala BBPP Ketindan,

The image shows a circular official stamp of the Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan (BBPP Ketindan). The stamp contains a central emblem with a plant and the text "BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN" around the top and "BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN" around the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Ir. Sumardi Noor, M.Si

NIP. 196401221994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp503,038,298.00 atau mencapai 100.61% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp500,000,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp20,566,070,201.00 atau mencapai 97.20% dari alokasi anggaran sebesar Rp21,158,298,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp42,582,769,575.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp8,850,000.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp42,566,651,643.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp7,267,932.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp16,308,165.00 dan Rp42,566,461,410.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp497,084,598.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp22,767,954,572.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-22,270,869,974.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp5,953,700.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-22,264,916,274.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp44,585,449,410.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-22,264,916,274.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp17,178,090.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp20,228,750,184.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp42,566,461,410.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	500,000,000.00	503,038,298.00	100.61	164,078,136.00
Jumlah Pendapatan		500,000,000.00	503,038,298.00	100.61	164,078,136.00
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	6,305,897,000.00	5,785,172,589.00	91.74	5,974,350,713.00
Belanja Barang	B.4.	14,605,115,000.00	14,534,562,112.00	99.52	7,609,804,948.00
Belanja Modal	B.5.	247,286,000.00	246,335,500.00	99.62	1,343,015,905.00
Jumlah Belanja		21,158,298,000.00	20,566,070,201.00	97.20	14,927,171,566.00

II. NERACA

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN NERACA PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	8,850,000.00	7,116,500.00
Jumlah Aset Lancar		8,850,000.00	7,116,500.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	13,890,000,000.00	13,890,000,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	16,677,008,815.00	17,542,067,574.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	31,836,888,520.00	31,836,888,520.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1,690,461,500.00	1,645,256,000.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	173,451,242.00	173,451,242.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-21,701,158,434.00	-20,499,794,623.00
Jumlah Aset Tetap		42,566,651,643.00	44,587,868,713.00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.4.1.	1,277,747,040.00	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2.	-1,270,479,108.00	0.00
Jumlah Aset Lainnya		7,267,932.00	0.00
Jumlah Aset		42,582,769,575.00	44,594,985,213.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.	16,308,165.00	9,535,803.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16,308,165.00	9,535,803.00
Jumlah Kewajiban		16,308,165.00	9,535,803.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	42,566,461,410.00	44,585,449,410.00
Jumlah Ekuitas		42,566,461,410.00	44,585,449,410.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		42,582,769,575.00	44,594,985,213.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	497,084,598.00	118,143,550.00
JUMLAH PENDAPATAN		497,084,598.00	118,143,550.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5,789,277,237.00	5,969,214,445.00
Beban Persediaan	D.3.	64,707,000.00	25,003,000.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	6,902,693,851.00	4,949,421,468.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1,123,810,750.00	1,355,192,310.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	6,246,598,225.00	1,268,975,338.00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	197,686,500.00	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2,443,181,009.00	2,785,880,414.00
JUMLAH BEBAN		22,767,954,572.00	16,353,686,975.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-22,270,869,974.00	-16,235,543,425.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	42,250,000.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	1,075,715.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	5,953,700.00	3,704,586.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	0.00	20,000.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5,953,700.00	44,858,871.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-22,264,916,274.00	-16,190,684,554.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	44,585,449,410.00	44,364,280,658.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-22,264,916,274.00	-16,190,684,554.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	17,178,090.00	1,648,759,876.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0.00	1,688,602,788.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	17,178,090.00	-39,842,912.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	20,228,750,184.00	14,763,093,430.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	-2,018,988,000.00	221,168,752.00
EKUITAS AKHIR	E.6.	42,566,461,410.00	44,585,449,410.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” . Yaitu dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian. Oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan tujuan tersebut maka BBPP Ketindan berusaha untuk :

- a. Meningkatkan kualitas program pelatihan berbasis kompetensi dan daya saing dengan penyediaan system informasi terintegrasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan pelatihan berkualitas dan konsultasi usaha tani yang prima;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas system pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian internal secara akurat, kridebel dan akuntabel;
- c. Meningkatkan kualitas teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- d. Meningkatkan kualitas teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- e. Meningkatkan kompetensi ketenagaan yang berdaya saing dan bermanfaat;
- f. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
- g. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi system administrasi dan manajemen.

Program BBPP Ketindan mengacu pada Program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian yaitu Program Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian. Program tersebut yang diimplementasikan ke dalam 4 (empat) kegiatan yaitu : (a). Penataan dan pemantapan kelembagaan pelatihan; (b). Peningkatan profesionalisme ketenagaan pelatihan pertanian; (c). Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan (d). Peningkatan kualitas program dan kerjasama pelatihan.

Untuk mencapai tujuan dan program tersebut di atas, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mempunyai Visi dan Misi. Visi BBPP Ketindan adalah “Menjadi lembaga pelatihan berkualitas untuk mewujudkan SDM pertanian yang professional dan berdaya saing”. Sedangkan misi BBPP Ketindan adalah :

1. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing serta mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan usaha komoditas pertanian melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usaha tani yang prima;
2. Mengembangkan system pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan sebagai bahan rekomendasi pimpinan dan melakukan pengendalian internal yang akurat, kridibel dan akuntabel;
3. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi dan berdaya saing sesuai dengan SKK dan SKKNI;

4. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan SKK dan SKKNI yang berdaya saing;
5. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian bioindustri menuju peningkatan dan kesejahteraan petani;
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi usaha tani;
7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi system administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
8. Melakukan peningkatan intensitas kerjasama dan promosi terutama bagi instalasi yang prospektif dan sudah pernah bekerjasama dengan pihak BBPP Ketindan.

Adapun strategi yang dilakukan oleh BBPP Ketindan dalam rangka mewujudkan visi dan misi adalah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Standarisasi Mutu Pelayanan Kediklatan melalui akreditasi Lembaga Pelatihan menuju ISO 14001:2004 dan ISO 17025, peningkatan ISO 9001:2018;
- Peningkatan sarana dan prasarana Balai secara optimal;
- Pengembangan dan pemberdayaan P4S dengan klasifikasi, pembinaan dan penguatan P4S;
- Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kediklatan dengan peningkatan profesionalisme widyaiswara dan petugas melalui magang, workshop, seminar, kajian dalam dan luar negeri;
- Sertifikasi tenaga kediklatan melalui MOT dan TOC;
- Pemantapan system pelatihan berbasis kompetensi yang mendukung swasembada pangan dan swasembada berkelanjutan dengan system CBT sesuai SKK dan SKKNI.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	323,210,000.00	323,210,000.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	176,790,000.00	176,790,000.00
Jumlah Pendapatan	500,000,000.00	500,000,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6,527,897,000.00	6,305,897,000.00
Belanja Barang Operasional	2,156,500,000.00	2,506,322,000.00
Belanja Barang Non Operasional	2,818,151,000.00	3,202,827,000.00
Belanja Barang Persediaan	63,760,000.00	67,000,000.00
Belanja Jasa	1,109,500,000.00	1,237,340,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,111,929,000.00	1,123,449,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6,085,319,000.00	6,270,177,000.00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	330,000,000.00	198,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313,570,000.00	247,286,000.00
Jumlah Belanja	20,516,626,000.00	21,158,298,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp503,038,298.00 atau mencapai 100.61% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp500,000,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	323,210,000.00	300,924,598.00	93.11

Uraian	2021		
Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Lain-Lain	0.00	5,953,700.00	0.00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	176,790,000.00	196,160,000.00	110.96
Jumlah	500,000,000.00	503,038,298.00	100.61

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 206.58% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	300,924,598.00	137,331,550.00	119.12
Pendapatan Lain-Lain	5,953,700.00	3,684,586.00	61.58
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	196,160,000.00	23,062,000.00	750.58
Jumlah	503,038,298.00	164,078,136.00	206.58

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp20,566,070,201.00 atau 97.20% dari anggaran belanja sebesar Rp21,158,298,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2021

Uraian	2021		
Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	6,305,897,000.00	5,796,222,610.00	91.92
Belanja Barang	14,605,115,000.00	14,534,562,112.00	99.52
Belanja Modal	247,286,000.00	246,335,500.00	99.62
Total Belanja Kotor	21,158,298,000.00	20,577,120,222.00	97.25
Pengembalian Belanja		-11,050,021.00	0.00
Total Belanja	21,158,298,000.00	20,566,070,201.00	97.20

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 37.78% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan anggaran penangan COVID Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) pada kegiatan pelatihan teknis pertanian sehingga pagu anggaran 2021 lebih besar dari tahun anggaran yang lalu.
2. Adanya percepatan pelaksanaan kegiatan rutin maupun PC PEN.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	5,785,172,589.00	5,974,350,713.00	-3.17
Belanja Barang	14,534,562,112.00	7,609,804,948.00	91.00
Belanja Modal	246,335,500.00	1,343,015,905.00	-81.66
Total Belanja	20,566,070,201.00	14,927,171,566.00	37.78

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5,785,172,589.00 dan Rp5,974,350,713.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -3.17% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tiga orang pegawai telah memasuki masa pensiun
2. Tidak ada belanja lembur untuk Tahun Anggaran 2021

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5,796,222,610.00	5,858,061,355.00	-1.06
Belanja Lembur	0.00	118,690,000.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	5,796,222,610.00	5,976,751,355.00	-3.02
Pengembalian Belanja Pegawai	-11,050,021.00	-2,400,642.00	360.29
Jumlah Belanja	5,785,172,589.00	5,974,350,713.00	-3.17

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14,534,562,112.00 dan Rp7,609,804,948.00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 91.00% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Meningkatnya Anggaran Belanja di TA 2021 dibanding TA 2020
2. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di beberapa wilayah kerja BBPP Ketindan, sehingga anggaran khusus perjalanan berupa rapid antigen fasilitator dan petugas meningkat.
3. Adanya pembayaran jasa (honorarium penceramah, honorarium pengajar eksternal dan honorarium panitia daerah serta rapid antigen).
4. Adanya penurunan anggaran belanja pemeliharaan pada tahun 2021.
5. Adanya realisasi kegiatan pelatihan vokasi bagi aparatur dan Non Aparatur dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Papua yang meliputi pelatihan tematik bagi aparatur dan nonaparatur, kewirausahaan dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2,496,668,891.00	2,332,587,247.00	7.03
Belanja Barang Non Operasional	3,188,697,900.00	1,825,114,125.00	74.71
Belanja Barang Persediaan	66,950,000.00	29,000,000.00	130.86
Belanja Jasa	1,214,659,346.00	798,426,428.00	52.13
Belanja Pemeliharaan	1,123,301,250.00	1,355,701,810.00	-17.14
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6,246,598,225.00	1,268,975,338.00	392.26
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemd	197,686,500.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	14,534,562,112.00	7,609,804,948.00	91.00
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	14,534,562,112.00	7,609,804,948.00	91.00

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp246,335,500.00 dan Rp1,343,015,905.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -81.66% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Menurunnya anggaran belanja modal di tahun 2021 yaitu belanja modal hanya dari anggaran yang bersumber dari PNB

2. Tidak ada anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan dari APBN.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246,335,500.00	365,876,000.00	-32.67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	977,139,905.00	-100.00
Jumlah Belanja Kotor	246,335,500.00	1,343,015,905.00	-81.66
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	246,335,500.00	1,343,015,905.00	-81.66

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp246,335,500.00 dan Rp365,876,000.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -32.67% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin menurun dikarenakan tidak ada alokasi anggaran belanja modal dari APBN sehingga belanja modal peralatan dan mesin bersumber dari PNPB.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246,335,500.00	365,876,000.00	-32.67
Jumlah Belanja Kotor	246,335,500.00	365,876,000.00	-32.67
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	246,335,500.00	365,876,000.00	-32.67

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8,850,000.00 dan Rp7,116,500.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	8,850,000.00	0.00
Bahan untuk Pemeliharaan	0.00	509,500.00
Bahan Baku	0.00	6,607,000.00
Jumlah	8,850,000.00	7,116,500.00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13,890,000,000.00 dan Rp13,890,000,000.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16,677,008,815.00 dan Rp17,542,067,574.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	17,542,067,574.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	246,335,500.00
Transfer Masuk	166,352,781.00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	28,600,000.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-1,277,747,040.00
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-28,600,000.00

Saldo per 31 Desember 2021	16,677,008,815.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-15,190,118,125.00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1,486,890,690.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembelian peralatan dan mesin yang meliputi CD Proyektor, printer, PC, sepeda gunung dan lain-lain.
2. Transfer masuk dari BPPSDMP Kementerian Pertanian berupa peralatan dan mesin berupa barang intrakomptabel yang meliputi Televisi, Sound System, Video Conference, Laptop, Microphone, PC, Tripod, Camera Digital, Bracket Standing dan barang ekstrakomptabel berupa kabel.
3. Mutasi kurang berasal dari penghentian aset dari penggunaannya karena kondisi rusak berat yang meliputi meja, kursi, gorden dan sebagainya.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp31,836,888,520.00 dan Rp31,836,888,520.00.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,690,461,500.00 dan Rp1,645,256,000.00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1,645,256,000.00
Mutasi Tambah	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	45,205,500.00
Saldo per 31 Desember 2021	1,690,461,500.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-730,195,322.00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	960,266,178.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

Koreksi nilai terhadap temuan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terhadap kapitalisasi perbaikan saluran irigasi dari akun belanja barang menjadi belanja modal.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar

Rp173,451,242.00 dan Rp173,451,242.00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	173,451,242.00
Mutasi Tambah	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	72,000.00
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	-72,000.00
Saldo per 31 Desember 2021	173,451,242.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	173,451,242.00

Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mutasi tambah berasal dari perolehan hasil tindak lanjut normalisasi yang berupa monografi.
2. Mutasi kurang berasal dari transaksi normalisasi BMN Aset tetap yang berupa monografi.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-21,701,158,434.00 dan Rp-20,499,794,623.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	16,677,008,815.00	-15,190,118,125.00	1,486,890,690.00
2.	Gedung dan Bangunan	31,836,888,520.00	-5,780,844,987.00	26,056,043,533.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,690,461,500.00	-730,195,322.00	960,266,178.00
4.	Aset Tetap Lainnya	173,451,242.00	0.00	173,451,242.00
Akumulasi Penyusutan		50,377,810,077.00	-21,701,158,434.00	28,676,651,643.00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,277,747,040.00 dan Rp0.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1,277,747,040.00
Saldo per 31 Desember 2021	1,277,747,040.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-1,270,479,108.00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	7,267,932.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

Peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat yang dihentikan penggunaannya meliputi gorden, laptop, meja, kursi dan sebagainya.

C.4.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-1,270,479,108.00 dan Rp0.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	1,277,747,040.00	-1,270,479,108.00	7,267,932.00
Akumulasi Penyusutan		1,277,747,040.00	-1,270,479,108.00	7,267,932.00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16,308,165.00 dan Rp9,535,803.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	4,104,648.00	0.00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	12,203,517.00	9,535,803.00
Jumlah	16,308,165.00	9,535,803.00

Belanja pegawai yang masih harus dibayar adalah belanja gaji pokok PNS, Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS dan Belanja Fungsional PNS yang mengalami kenaikan pangkat pada tahun 2021 namun SK yang bersangkutan diterima pada Januari 2022.

Belanja barang yang masih harus dibayar adalah tagihan belanja listrik dan telepon bulan Desember tahun 2021 yang dibayarkan bulan Januari 2022.

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp42,566,461,410.00 dan Rp44,585,449,410.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp497,084,598.00 dan Rp118,143,550.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	195,960,000.00	22,962,000.00	753.41
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	200,000.00	100,000.00	100.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	207,100,000.00	62,325,000.00	232.29
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	55,542,600.00	11,713,000.00	374.20
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	38,281,998.00	21,043,550.00	81.92
Jumlah	497,084,598.00	118,143,550.00	320.75

1. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan adalah Pendapatan dari Pelatihan Kerjasama dengan PT Seger Agro Nusantara (SAN), Dinas Pertanian Kabupaten Tuban dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember.
2. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya berasal dari jasa permagangan dan penelitian.
3. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi berasal dari penggunaan sarana dan prasarana balai seperti ruang kelas, aula, sound system, asrama dan guest house.
4. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya berasal dari penjualan hasil pertanian dan pengolahan hasil laboratorium di balai.
5. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa perolehan atas sewa rumah dinas dan Koperasi Batih.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5,789,277,237.00 dan Rp5,969,214,445.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3,963,939,000.00	4,015,330,300.00	-1.28
Beban Pembulatan Gaji PNS	55,105.00	51,447.00	7.11
Beban Tunj. Anak PNS	101,800,422.00	104,074,440.00	-2.19
Beban Tunj. Beras PNS	242,462,160.00	213,856,260.00	13.38
Beban Tunj. Fungsional PNS	426,410,000.00	298,460,000.00	42.87
Beban Tunj. PPh PNS	25,212,280.00	21,396,578.00	17.83
Beban Tunj. Struktural PNS	43,240,000.00	123,630,000.00	-65.02
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	332,850,270.00	339,140,420.00	-1.85
Beban Tunjangan Umum PNS	92,210,000.00	105,305,000.00	-12.44
Beban Uang Lembur	0.00	118,690,000.00	-100.00
Beban Uang Makan PNS	561,098,000.00	629,280,000.00	-10.83
Jumlah	5,789,277,237.00	5,969,214,445.00	-3.01

1. Beban Gaji Pokok PNS mengalami penurunan karena adanya tiga pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
2. Beban Pembulatan Gaji PNS mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya kenaikan berkala, pangkat dan dan sudah terealisasinya Gaji ke 13 dan Gaji ke 14.
3. Beban Tunj. Anak PNS mengalami penurunan karena adanya dua anak pegawai yang sudah dikategorikan tidak berhak menerima tunjangan anak.
4. Beban Tunj. Beras PNS mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya kenaikan berkala, pangkat dan dan sudah terealisasinya Gaji ke 13 dan Gaji ke 14.
5. Beban Tunj. Fungsional PNS mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya kenaikan berkala, pangkat dan dan sudah terealisasinya Gaji ke 13 dan Gaji ke 14.
6. Beban Tunj. PPh PNS mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena adanya kenaikan berkala, pangkat dan dan sudah terealisasinya Gaji ke 13 dan Gaji ke 14.

7. Beban Tunj. Struktural PNS mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena adanya perubahan dari jabatan Struktural Eselon III dan IV mengalami transformasi menjadi Pejabat Fungsional.
8. Beban Tunj. Suami/Istri PNS mengalami penurunan karena adanya tiga pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
9. Beban Tunjangan Umum PNS mengalami penurunan karena adanya tiga pegawai yang telah memasuki masa pensiun.
10. Beban Uang Makan PNS mengalami penurunan karena banyak pegawai yang sakit dan dinas luar.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp64,707,000.00 dan Rp25,003,000.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	36,607,000.00	13,393,000.00	173.33
Beban Persediaan konsumsi	28,100,000.00	11,610,000.00	142.03
Jumlah	64,707,000.00	25,003,000.00	158.80

1. Beban Persediaan Bahan Baku mengalami kenaikan anggaran dibanding tahun sebelumnya karena digunakan sebagai Beban Persediaan Barang Penanganan Pandemi Covid 19.
2. Beban Persediaan Konsumsi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun lalu Beban Persediaan terkena pemotongan anggaran yang diperuntukkan penanganan Pandemi Covid 19.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6,902,693,851.00 dan Rp4,949,421,468.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	1,333,586,775.00	1,583,871,125.00	-15.80
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,679,988,725.00	154,673,000.00	986.16
Beban Barang Non Operasional Lainnya	131,922,400.00	59,870,000.00	120.35
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	232,091,045.00	362,113,502.00	-35.91
Beban Barang Operasional Lainnya	1,060,371,264.00	748,387,950.00	41.69
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	84,279,000.00	119,640,000.00	-29.56
Beban Honor Output Kegiatan	43,200,000.00	26,700,000.00	61.80
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	562,992,500.00	177,180,000.00	217.75
Beban Jasa Lainnya	115,600,000.00	17,600,000.00	556.82
Beban Jasa Profesi	326,580,000.00	285,450,000.00	14.41
Beban Keperluan Perkantoran	1,113,507,782.00	1,099,325,815.00	1.29
Beban Langganan Listrik	137,057,054.00	210,171,749.00	-34.79
Beban Langganan Telepon	3,447,506.00	3,818,347.00	-9.71
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,419,800.00	3,119,980.00	105.76
Beban Sewa	71,650,000.00	97,500,000.00	-26.51
Jumlah	6,902,693,851.00	4,949,421,468.00	39.46

1. Beban Bahan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan penurunan anggaran pelatihan di balai seperti ATK, fotocopy dan pelaporan.
2. Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 naik signifikan dibanding tahun lalu, dikarenakan pada tahun 2021 mulai diselenggarakan pelatihan sehingga membutuhkan ATK, biaya pelaporan dan sebagainya yang menggunakan anggaran khusus penanganan pandemic COVID-19 (PEN).
3. Beban Barang Non Operasional Lainnya mengalami peningkatan signifikan yang disebabkan oleh diselenggarakannya kegiatan pelatihan dalam rangka PC PEN, seperti belanja untuk P3K dan perlengkapan penunjang lainnya.
4. Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan turunnya anggaran Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID – 19 seperti keperluan untuk penambah daya tahan tubuh dan vitamin.

5. Beban Barang Operasional Lainnya mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan kenaikan anggaran untuk operasional lahan praktek, instalasi laboratorium dan perkantoran
6. Beban Honor Operasional Satuan Kerja mengalami penurunan dikarenakan pengelola anggaran pada Tahun 2021 sudah menjadi Fungsional tertentu sehingga honor Operasional Satker diberikan sesuai aturan yang berlaku.
7. Beban Honor Output Kegiatan berupa honor panitia mengalami kenaikan dibanding Tahun sebelumnya dikarenakan adanya pelaksanaan pelatihan di luar Balai Pelatihan Pertanian Ketindan.
8. Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pada Tahun lalu belum ada anggaran khusus penanganan pandemic COVID-19 (PEN) yang berupa rapid test dan penyemprotan disinfektan.
9. Beban Jasa Lainnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan biaya Surveillance ISO 37001.
10. Beban Jasa Profesi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan anggaran dibanding tahun sebelumnya yang berupa honor setingkat eselon I, honor praktisi dan moderator.
11. Beban Keperluan Perkantoran mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya kegiatan operasional perkantoran dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat ditutup akibat pandemi Covid-19.
12. Beban Langganan Listrik mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan masih sedikitnya pelatihan yang dilaksanakan di Balai sehingga penggunaan Listrik menurun.
13. Beban Langganan Telepon mengalami penurunan yang disebabkan oleh berkurangnya penggunaan telepon dan beralih pada jaringan internet.
14. Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat mengalami kenaikan dikarenakan meningkatnya pengiriman sertifikat kepada peserta di wilayah kerja BBPP Ketindan.
15. Beban Sewa mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan menurunnya sewa kendaraan sehubungan masih sedikitnya pelatihan yang dilaksanakan di Balai

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1,123,810,750.00 dan Rp1,355,192,310.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	596,578,000.00	826,922,310.00	-27.86
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	4,875,000.00	-100.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	476,324,000.00	473,507,000.00	0.59
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	50,908,750.00	49,888,000.00	2.05
Jumlah	1,123,810,750.00	1,355,192,310.00	-17.07

1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan dibanding tahun lalu dikarenakan sedikitnya nilai gedung dan bangunan yang dipelihara.
2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan dibanding tahun lalu dikarenakan adanya pemeliharaan berkala untuk peralatan dan mesin.
3. Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan mengalami kenaikan tahun lalu dikarenakan kenaikan harga barang untuk pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6,246,598,225.00 dan Rp1,268,975,338.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	751,015,913.00	550,432,405.00	36.44
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	4,158,056,940.00	0.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	283,440,372.00	529,594,728.00	-46.48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,054,085,000.00	188,948,205.00	457.87
Jumlah	6,246,598,225.00	1,268,975,338.00	392.26

1. Beban perjalanan dinas Biasa mengalami kenaikan dibanding tahun yang lalu karena kegiatan pelatihan mulai berjalan dan dilaksanakan di luar balai.
2. Beban Perjalanan Dinas – penanganan pandemi COVID-19 merupakan anggaran PC PEN yang diperuntukkan kegiatan pelatihan Tematik bagi aparatur dan non aparatur dan kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di beberapa lokasi di luar Balai antara lain di Provinsi Jawa Timur, Bali dan NTB.
3. Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota mengalami penurunan dibanding dengan tahun anggaran yang lalu, hal ini disebabkan oleh adanya pemangkasan anggaran pada kegiatan pelatihan.
4. Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota lebih besar dibanding dengan tahun anggaran yang lalu dikarenakan adanya kegiatan pelatihan Tematik bagi aparatur dan non aparatur dan kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di beberapa lokasi di luar Balai antara lain di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Papua.

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp197,686,500.00 dan Rp0.00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	197,686,500.00	0.00	0.00
Jumlah	197,686,500.00	0.00	0.00

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat mengalami peningkatan dikarenakan terdapatnya APBN yang dialokasikan untuk pembelian barang yang diserahkan kepada P4S di Jawa Timur seperti LCD proyektor, Laptop, PC, meja, kursi dan almari.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2,443,181,009.00 dan Rp2,785,880,414.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat

ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,602,866,271.00	1,625,044,571.00	-1.36
Beban Penyusutan Irigasi	26,565,066.00	24,756,846.00	7.30
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	102,996,222.00	156,638,222.00	-34.25
Beban Penyusutan Jaringan	19,105,388.00	19,105,388.00	0.00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	13,055,280.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	678,592,782.00	960,335,387.00	-29.34
Jumlah	2,443,181,009.00	2,785,880,414.00	-12.30

1. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan mengalami penurunan dibanding tahun lalu dikarenakan adanya penambahan nilai gedung dan bangunan dari revaluasi BMN.
2. Beban Penyusutan Irigasi mengalami kenaikan dibanding tahun lalu dikarenakan adanya peningkatan nilai Irigasi akibat koreksi.
3. Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan mengalami penurunan dibanding tahun lalu dikarenakan adanya penurunan nilai BMN.
4. Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah menjadi ada dikarenakan adanya penghentian BMN yang tidak digunakan.
5. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin mengalami penurunan dibanding tahun lalu dikarenakan adanya penurunan nilai BMN.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00	-1,075,715.00	-100.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	-20,000.00	-100.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0.00	20,000.00	-100.00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0.00	42,250,000.00	-100.00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4,338,500.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,615,200.00	3,684,586.00	-56.16
Jumlah	5,953,700.00	44,858,871.00	-86.73

1. Beban Kerugian Pelepasan Aset tidak ada dikarenakan adanya penghapusan BMN melalui proses lelang yang dilaksanakan tahun 2020.
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu menindaklanjuti temuan Itjen yaitu setoran senilai Rp. 3.911.500 karena kelebihan pembayaran pekerjaan pembuatan saluran air di Tahun 2020 dan setoran senilai Rp. 427.000 kelebihan kegiatan kerjasama.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dikarenakan adanya setoran sewa rumah dinas yang belum dibayar

D.10. Selisih Neraca Percobaan Kas dengan Laporan Operasional

Terdapat selisih Neraca Percobaan Kas dengan Laporan Operasional sebagai berikut:

Selisih Neraca Percobaan Kas dengan Laporan Operasional
per 31 Desember 2021

Uraian	Neraca Percobaan Kas	LO	Selisih
Gaji Pokok PNS	3.960.540.900,00	3.963.939.000,00	(3.398.100,00)
Tunjangan Suami/Istri PNS	332.553.300,00	332.850.270,00	(296.970,00)
Tunjangan Anak PNS	101.690.844,00	101.800.422,00	(109.578,00)
Tunjangan Fungsional PNS	426.110.000,00	426.410.000,00	(300.000,00)
Langganan Listrik	134.268.592,00	137.057.054,00	(2.788.462,00)
Langganan Telepon	3.568.254,00	3.447.506,00	120.748,00

1. Gaji Pokok PNS terdapat selisih senilai Rp. 3.398.100,00 yang disebabkan oleh kenaikan gaji pokok PNS dengan SK terlampir a.n Asep Koswara, Fransisca Lani dan Murdani yang dibayarkan 17 Januari 2022.
2. Tunjangan Suami/istri PNS terdapat selisih senilai Rp. 296.970,00 yang disebabkan oleh kenaikan tunjangan suami /istri PNS dengan SK terlampir a.n Asep Koswara, Fransisca Lani dan Murdani yang dibayarkan 17 Januari 2022.
3. Tunjangan Anak PNS terdapat selisih senilai Rp. 109.578,00 yang disebabkan kenaikan tunjangan suami /istri PNS dengan SK terlampir a.n Asep Koswara, Fransisca Lani dan Murdani yang dibayarkan 17 Januari 2022.
4. Tunjangan fungsional PNS terdapat selisih senilai Rp. 300.000,00 yang disebabkan oleh kenaikan tunjangan fungsional dengan SK terlampir a.n Nining Hariyani yang dibayarkan 17 Januari 2022.
5. Langganan listrik terdapat selisih senilai Rp. 2.788.462,00 yang disebabkan selisih antara penyesuaian listrik bulan Desember 2020 dan belanja listrik bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada tanggal 7 Januari 2022.
6. Langganan telepon terdapat selisih senilai Rp. 120.748,00 yang disebabkan selisih antara penyesuaian telepon bulan Desember 2020 dan belanja telepon bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada tanggal 7 Januari 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp44,585,449,410.00 dan Rp44,364,280,658.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-22,264,916,274.00 dan Rp-16,190,684,554.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17,178,090.00 dan Rp1,648,759,876.00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp1,688,602,788.00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp17,178,090.00 dan Rp-39,842,912.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-28,027,410.00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00
Aset Tetap Lainnya	0.00
Irigasi	45,205,500.00
Peralatan dan Mesin	0.00
Jumlah	17,178,090.00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp20,228,750,184.00 dan Rp14,763,093,430.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	20,566,070,201.00
Diterima dari Entitas Lain	-503,038,298.00
Transfer Masuk	165,718,281.00
Jumlah	20,228,750,184.00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-503,038,298.00 sedangkan DKEL sebesar Rp20,566,070,201.00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp165,718,281.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018100199412069000KP	166,352,781.00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	018100199412069000KP	-634,500.00
Jumlah			165,718,281.00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-2,018,988,000.00 dan Rp221,168,752.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. KRONOLOGIS REVISI DIPA I ANGGARAN TAHUN 2021

1. Pemotongan anggaran yang semula Rp. 20.516.626.000,- menjadi Rp. 14.821.816.000,-
2. Pelatihan bagi Aparatur yang semula target peserta 60 orang dengan anggaran Rp. 463.800.000,- menjadi target peserta 30 orang dengan anggaran Rp. 165.000.000,-
3. Pelatihan bagi Non Aparatur yang semula target peserta 1.620 orang dengan anggaran Rp. 3.066.660.000,- menjadi target peserta 330 orang dengan anggaran Rp. 1.075.080.000,-
4. Sertifikasi Profesi Pertanian yang semula target peserta 120 orang dengan anggaran Rp. 312.000.000,- menjadi target peserta 30 orang dengan anggaran Rp. 78.000.000,-
5. Koordinasi dengan target 7 kegiatan dengan anggaran semula Rp. 5.745.430.000,- menjadi Rp. 2.575.000.000,-

KRONOLOGIS REVISI DIPA I POK 1 ANGGARAN TAHUN 2021

Revisi pemisahan anggaran kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh pada output Koordinasi sub output Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan berdasarkan Provinsi tempat pelaksanaan Bimtek.

KRONOLOGIS REVISI DIPA II ANGGARAN TAHUN 2021

Penambahan anggaran sebesar Rp. 5.895.220.000,- dimana anggaran yang semula Rp. 14.821.816.000,- menjadi Rp. 20.717.036.000,-, dengan rincian :

- Penambahan anggaran Pengawasan, Pendampingan, Supervisi dan Monev pada output Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN) sebesar Rp. 206.000.000,-
- Penambahan anggaran Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur (PEN) dengan target peserta 870 orang dengan anggaran sebesar Rp. 1.620.120.000,-
- Penambahan anggaran Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur (PEN) dengan target peserta 2.100 orang dengan anggaran sebesar Rp. 4.069.100.000,-

KRONOLOGIS REVISI DIPA III ANGGARAN TAHUN 2021

1. Revisi DIPA dalam rangka penambahan target peserta pelatihan dan anggaran pada sub output Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur pada output Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sebanyak 8 orang yang berasal dari PT. SAN dengan anggaran sebesar Rp. 29.205.000,- yang berasal dari anggaran PNPB dari sub output Sarana Pelatihan Pertanian pada output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

KRONOLOGIS REVISI DIPA IV ANGGARAN TAHUN 2021

1. Penambahan anggaran sebesar Rp. 448.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Pelatihan Tematik KUB Daerah Tingkat Urbanisasi Pemuda Tani (Indonesia Timur) dengan target 62 orang sebesar Rp. 137.500.000 dengan alokasi peserta 53 orang dari Provinsi NTB dan 9 orang Provinsi Papua (Memberamo Raya)
 - Sertifikasi THL TB-PP (blm lulus P3K) dengan target 24 orang sebesar Rp. 36.000.000,- dengan alokasi peserta dari Provinsi Bali dan NTB.
 - Kegiatan yang mendukung Tusi UPT sebesar Rp. 275.000.000,- yang tersebar dalam sub komponen Penyusunan Rencana Kerja Kinerja Kegiatan dan Anggaran, Administrasi Kegiatan, Sistem Informasi Publikasi dan Promosi, Profesionalisme Widyaiswara dan Profesionalisme Petugas.
2. Revisi DIPA halaman IV terkait anggaran PEN untuk Komponen Pelatihan bagi Aparatur dan Pelatihan bagi Non Aparatur
 3. Revisi DIPA dalam rangka penambahan target peserta pelatihan dan anggaran pada sub output Pelatihan Pertanian bagi Aparatur pada output Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sebanyak 30 orang dari Kabupaten Tuban dengan anggaran sebesar Rp. 43.000.000,- yang berasal dari anggaran PNPB dari sub output Sarana Pelatihan Pertanian pada output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
 4. Revisi penambahan akun covid dalam rangka penanganan pandemic Covid pada sub komponen Operasional Perkantoran sebesar Rp. 60.000.000,-.

KRONOLOGIS REVISI DIPA V ANGGARAN TAHUN 2021

1. Refocusing anggaran sebesar Rp. 175.000.000,- dimana terdiri dari
 - Penumbuhan dan pengembangan P4S sebesar Rp. 132.000.000,-
 - Peningkatan profesionalisme Widyaiswara sebesar Rp. 28.000.000,-
 - Peningkatan profesionalisme petugas sebesar Rp. 15.000.000,-
2. Pemotongan belanja pegawai (gaji) sebesar Rp. 200.000.000,-.
3. Penghapusan Pelatihan Tematik KAUAB Daerah Tingkat Urbanisasi Pemuda Tani (Indonesia Timur) Prov NTB sebesar Rp. 106.000.000,- dan Pelatihan Tematik KAUB Daerah Tingkat Urbanisasi Pemuda Tani (Indonesia Timur) Prov. Papua sebesar Rp. 31.500.000,-

KRONOLOGIS REVISI DIPA VI ANGGARAN TAHUN 2021

1. Revisi DIPA dalam rangka penambahan target peserta pelatihan dan anggaran pada sub output Pelatihan Pertanian bagi Aparatur pada output Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sebanyak 15 orang dari Kabupaten Jember dengan anggaran sebesar Rp. 30.035.000,- yang berasal dari anggaran PNPB dari sub output Sarana Pelatihan Pertanian pada output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
2. Revisi DIPA dalam rangka penambahan target peserta Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian sebanyak 20 orang dengan anggaran sebesar Rp. 66.284.000,- dari Kabupaten Jember yang berasal dari anggaran PNPB dari sub output Sarana Pelatihan Pertanian pada output Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dimana ada penyesuaian penggunaan target PNPB untuk belanja modal peralatan dan mesin.

KRONOLOGIS REVISI DIPA VII ANGGARAN TAHUN 2021

1. Penghapusan kegiatan dan anggaran pada output Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sub output Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur yaitu TOT Pelatihan di Povinsi Jawa Timur dan Bali dan TOT Pelatihan di Provinsi Papua dengan target peserta 260 org dengan anggaran sebesar Rp. 503.620.000,-
2. Penambahan target peserta pelatihan dan anggaran pada output Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sub output Pelatihan Pertanian bagi Aparatur sebanyak 125 orang camat dari Provinsi Jawa Timur, Bali dan Papua dengan judul Pelatihan Pertanian bagi Camat Mendukung Ketersediaan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 158.932.000,-
3. Penambahan target peserta pelatihan dan anggaran pada output Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan sub output Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur sebanyak 300 orang Petani Milenial di Provinsi Papua dengan judul Pelatihan Mendukung Ketersediaan Pangan bagi Petani Milenial dengan anggaran sebesar Rp. 871.950.000,-

KRONOLOGIS REVISI DIPA VIII ANGGARAN TAHUN 2021

Revisi pemutakhiran data dan penyesuaian DIPA halaman III sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dan evaluasi Indikator Kinerja Deviasi Halaman III DIPA sampai dengan bulan Nopember Tahun Anggaran 2021.

F.2. PENGUNGKAPAN KEGIATAN PC PEN

Akun Belanja Pencegahan dan Penanganan Covid dan Kegiatan PC PEN sudah tersedia pada RKAKL dan sudah menggunakan akun Covid-19, sehingga tidak perlu lagi dilakukan revisi.

- Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 Rp. 203.755.000,- terdiri dari :

Akun 521131 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.72.755.000,- terealisasi senilai Rp. 72.754.150,-

Akun 521841 Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.30.000.000,- terealisasi penuh senilai Rp. 30.000.000,-

Akun 522192 Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.101.000.000,- terealisasi senilai Rp. 101.000.000,-
- Penambahan anggaran khususnya anggaran pada kegiatan PC PEN adalah sebagai berikut :

Kegiatan Koordinasi untuk Pengawasan, Pendampingan, Supervisi dan Monev senilai Rp. 206.000.000,- terdiri dari :

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 18.000.000,- terealisasi penuh senilai Rp.18.000.000,-.

Akun 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 188.000.000,- , sudah terealisasi penuh senilai Rp. 188.000.000,-

- Kegiatan Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan yaitu :

Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur senilai Rp.1.779.052.000,- terdiri dari:

Pelaksanaan:

1. Pelatihan Tematik bagi Aparatur di Provinsi Jawa Timur, terdiri dari

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 232.900.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 232.700.000,-

Akun 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp 45.900.000,- sudah terealisasi penuh senilai Rp. 45.900.000,-

Akun 524115 Belanja Perjalanann Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 351.611.000,- , sudah terealisasi senilai Rp. 350.890.000,-

2. Pelatihan Tematik bagi Aparatur di Provinsi Papua, terdiri dari

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 128.590.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 128.585.000,-

Akun 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp 50.400.000,- sudah terealisasi senilai Rp.50.292.500,-

Akun 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 513.940.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 509.320.000,-

3. Pelatihan Manajerial BPP Kostratani

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 68.500.000,- dan sudah terealisasi senilai Rp. 64.000.000,-

Akun 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp 16.500.000 sudah terealisasi senilai Rp.13.800.000,-.

Akun 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 97.100.000,- sudah terealisasi senilai Rp.96.800.000,-

4. Layanan Dukungan Pelatihan terdiri dari :

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 105.979.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 105.945.000,-

5. Pelatihan Pertanian bagi Camat Mendukung Ketersediaan Pangan

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.46.525.000,- sudah terealisasi senilai Rp.46.520.000,-.

Akun 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.8.800.000,- sudah terealisasi senilai Rp.8.800.000,-.

Akun 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.101.607.000 terealisasi senilai Rp.101.540.000,-

Pelaporan :

1. Pelatihan Tematik bagi Aparatur di Provinsi Jawa Timur, terdiri dari

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 5.100.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 5.100.000,-

2. Pelatihan Tematik bagi Aparatur di Provinsi Papua, terdiri dari

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 2.100.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 2.100.000,-

3. Pelatihan Manajerial BPP Kostratani

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 1.500.000,- terealisasi penuh senilai Rp. 1.500.000,-

4. Pelatihan Pertanian bagi Camat Mendukung Ketersediaan Pangan

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.2.000.000,- terealisasi penuh senilai Rp.2.000.000,-.

Pelatihan Pertanian bagi Non Aparatur :

1. Pelatihan Kewirausahaan Pertanian (Blanded) di Prov. Papua

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 19.190.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 18.790.000,-

Akun 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp 2.700.000,- terealisasi senilai Rp.2.700.000,-

Akun 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 79.850.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 79.350.000,-

2. Pelatihan Tematik bagi Non Aparatur di Provinsi Jawa Timur

Akun 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 346.050.000,- dan sudah terealisasi penuh Rp. 346.050.000,-

Akun 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp 67.500.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 67.500.000,-

Akun 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 459.950.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 457.800.000,-

3. Pelatihan Tematik bagi Non Aparatur di Provinsi Papua

AKUN 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 128.590.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 128.550.000,-

AKUN 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp 50.400.000,- sudah terealisasi penuh senilai Rp.50.400.000,-

AKUN 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.513.968.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 513.920.000,-

4. Pelatihan Mendukung Ketersediaan Pangan bagi Petani Milenial

AKUN 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.97.150.000,- terealisasi penuh senilai Rp.97.150.000,-

AKUN 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp 46.500.000,- terealisasi penuh senilai Rp.46.500.000,-

AKUN 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.725.300.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 725.300.000,-

5. Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani

AKUN 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 347.333.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 346.157.900,-

AKUN 522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.181.000.000,- sudah terealisasi senilai Rp. 176.100.000,-

AKUN 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.1.035.736.000,- terealisasi senilai Rp.1.035.136.940,-

6. Layanan Dukungan Pelatihan

AKUN 521131 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 99.347.000,- terealisasi senilai Rp.99.337.000,-

AKUN 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.109.966.000,- terealisasi senilai Rp.109.941.000,-

AKUN 524115 Belanja Perjalanan Dinas – Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp.100.000.000,- sudah terealisasi senilai Rp.100.000.000,-

Pelaporan

1. Pelatihan Kewirausahaan Pertanian (Blanded) di Prov. Papua

AKUN 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 300.000,- terealisasi penuh senilai Rp.300.000,-

2. Pelatihan Tematik bagi Non Aparatur di Provinsi Jawa Timur

AKUN 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 7.500.000,- sudah terealisasi senilai Rp.7.500.000,-

3. Pelatihan Tematik bagi Non Aparatur Prov. Papua

AKUN 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 2.100.000,- terealisasi penuh senilai Rp.2.100.000,-.

4. Pelatihan Mendukung Ketersediaan Pangan bagi Petani Milenial

AKUN 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 3.000.000,- terealisasi penuh senilai Rp.3.000.000,-.

5. Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani

AKUN 521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19 senilai Rp. 14.000.000,- sudah terealisasi senilai Rp.13.999.825,-

D. Layanan Perkantoran UPT Pelatihan sebesar Rp.60.000.000,- terdiri dari:

Akun 521131 Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 senilai Rp.60.000.000,- terealisasi senilai Rp.59.999.895,-

F.3. Setoran Pengembalian Dari Pegawai

Terdapat setoran pengembalian dari pegawai sebagai berikut:

1. Terdapat setoran pengembalian uang makan pegawai tugas belajar yang dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2022 sebesar Rp.703.000,-.
2. Terdapat pengembalian kelebihan honorarium PPK Januari s.d Maret 2021 dikarenakan yang bersangkutan telah diangkat sebagai pejabat fungsional keuangan sebesar Rp.5.256.000,- dan dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2022.
3. Terdapat pengembalian kelebihan honorarium PPSPM Januari s.d Maret 2021 dikarenakan yang bersangkutan telah diangkat sebagai pejabat fungsional keuangan sebesar Rp.2.250.000,- dan dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2022.

F.4. Rekening Pemerintah

Rekening bendahara pengeluaran mengalami penggantian menjadi virtual account, yang nomor rekening bendahara yang lama berganti dari nomor rekening 1440011747927 menjadi 8100122396541000 an. BPG Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada PT Bank Mandiri KCP Lawang sesuai surat persetujuan Pembukaan kembali rekening dari KPPN Tipe A1 Jakarta nomor: S-1271/WPB.12/KP.05/2020, Tanggal 29 Juni 2020.